

## BAB III

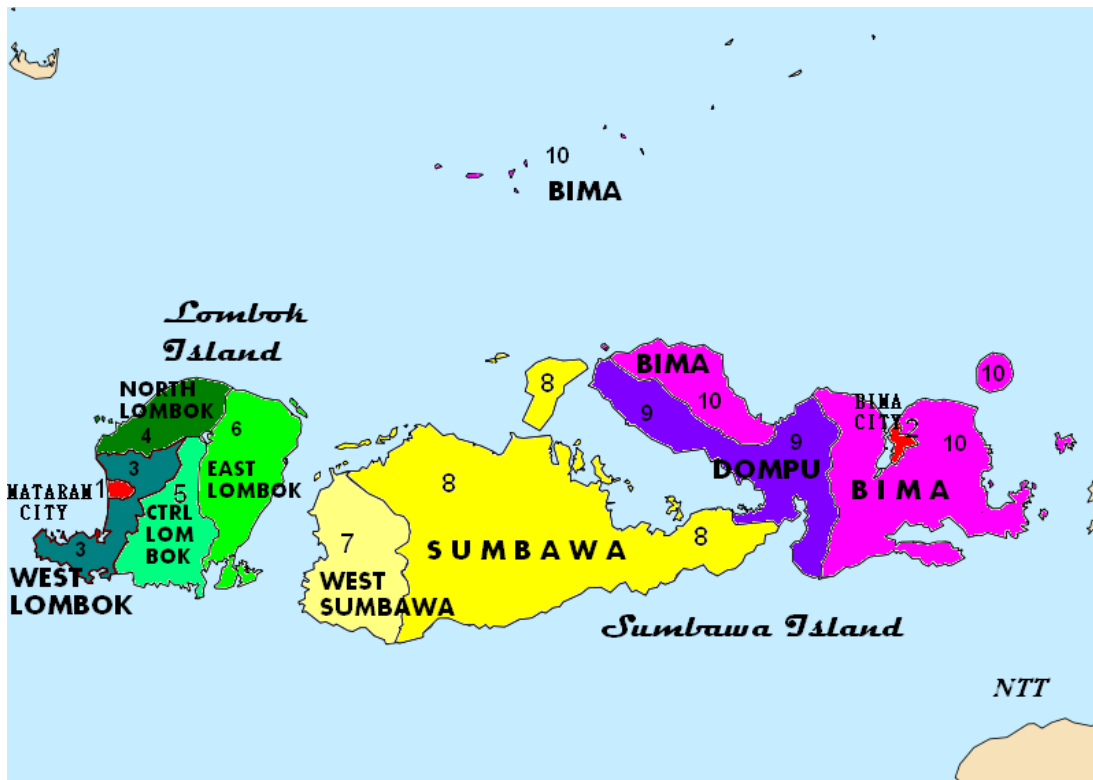
### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1 Gambaran Umum Provinsi NTB

##### 3.1.1 Kondisi Geografis Provinsi NTB

Nusa Tenggara Barat atau yang biasa disebut dengan NTB merupakan sebuah provinsi di Indonesia bagian barat kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi NTB sendiri beribukota di Mataram dan memiliki 10 Kabupaten dan Kota, dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di Barat dengan luas 4.738,70 km<sup>2</sup> dan Sumbawa yang terletak di Timur dengan luas 15.414,5 km<sup>2</sup>, selain itu terdapat pulau-pulau kecil sekitar 378 pulau. Untuk luas wilayah Provinsi NTB mencapai sekitar 49.312,19 km<sup>2</sup> terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km<sup>2</sup> (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km<sup>2</sup> (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km<sup>2</sup>.

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46'-119°05' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali dan Sebelah Timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan temperature udara Menurut BMKG pada tahun 2017 di Provinsi NTB sekitar 33,2°C-33,6°C temperature udara minimum 17°C-21,4°C dan temperature rata-rata 26,9°C-27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57%-64% dan kelembaban udara maksimum 94%-96%. Berikut adalah gambar atau peta Provinsi NTB:



**Gambar 3.1**  
**Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Secara administrative Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan 116 Wilayah Kecamatan dan 1.146 desa /Kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah Kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa /kelurahan terbanyak dengan 254 desa /kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Jumlah Kecamatan, Desa /Kelurahan dan Luas Wilayah Tahun 2017**

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kab. Lombok Barat	10	122	1.053,92
2.	Kab. Lombok Utara	5	33	809,53
3.	Kab. Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4.	Kab. Lombok Timur	20	254	1.605,55
5.	Kab. Sumbawa	24	165	6.643,98
6.	Kab. Dompu	8	81	2.324,60
7.	Kab. Bima	18	191	4.389,40
8.	Kab. Sumbawa Barat	8	64	1.849,02
9.	Kota Mataram	6	50	61,30
10.	Kota Bima	5	38	207,50
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>1.137</b>	<b>20.153,15</b>

Sumber : DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan data di atas sangat terlihat bahwa Kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Sumbawa dengan jumlah 24 Kecamatan dengan 165 Desa/Kelurahan dan disusul dengan Kecamatan Kabupaten Lombok timur yang berjumlah 20 Kecamatan dengan 254 Desa/Kelurahan, untuk luas wilayah pun Kabupaten Sumbawa yang paling luas yaitu dengan luas 6.643,98 km.

### **3.1.2 Topografis Provinsi NTB**

Topografi wilayah provinsi NTB bervariasi dari 0-3.726 mdpl untuk pulau Lombok sedangkan untuk pulau Sumbawa 0-2.755 mdpl, dengan ketinggian wilayah sekitar 0-100 mdpl atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100-500 mdpl luasnya sekitar 753.612 Ha, ketinggian 500-1000 mdpl luasnya 307.259 Ha. Untuk kemiringannya sendiri di dominasi oleh kemiringan antara

15-40% seluas 704.619 Ha sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 2-15% seluas 198.616 Ha.

### 3.1.3 Demografi Provinsi NTB

Pertumbuhan penduduk dimaknai sebagai perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai adanya perubahan baik peningkatan maupun penurunan jumlah individu dalam sebuah populasi berdasarkan “per waktu unit” untuk pengukuran. Berikut jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2013-2017:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017**

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
2013	2.244.721	2.385.581	4.630.302	1.41	1.35	1.38	94.1
	48,48%	51,52%	100%				
2014	2.315.234	2.458.561	4.773.795	1.37	1.31	1.34	94.17
	48,50%	51,50%	100%				
2015	2.345.811	2.489.766	4.835.577	1.32	1.27	1.29	94.22
	48,51%	51,49%	100%				
2016	2.357.750	2.520.421	4.896.162	1.28	1.23	1.25	94.26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1.23	1.19	1.21	94.3
	-48.53	-51.47	100%				

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

Dilihat dari data di atas penduduk NTB lebih didominasi oleh penduduk perempuan dibandingkan laki-laki, namun demikian persentase pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada persentase pertumbuhan penduduk perempuan. Persentase pertumbuhan penduduk tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan trend menurun, hal ini menunjukkan

pertambahan jumlah penduduk NTB selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidaklah terlalu signifikan. Penurunan persentase pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB). Pendewasaan usia perkawinan dan generasi berencana sudah berjalan efektif. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 1.21% atau sebanyak 59.416 jiwa. Apabila dilihat dari distribusi persebaran penduduk di Provinsi NTB tergolong belum merata, berikut data distribusi penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota 2013-2017 (Jiwa):

**Tabel 3.3**  
**Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2013-2017(Jiwa)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	620.412	644.586	654.892	665.132	675.222
2	Lombok Utara	205.064	210.133	212.265	214.393	216.515
3	Lombok Tengah	881.686	903.432	912.879	922.088	930.797
4	Lombok Timur	1.130.365	1.153.773	1.164.018	1.173.781	1.183.204
5	Kota Matarm	419.641	441.064	450.226	456.314	468.509
	Pulau Lombok	3.310.898	3.352.988	3.394.280	3.434.708	3.474.274
6	Sumbawa Barat	121.167	129.724	133.391	147.072	140.890
7	Sumbawa	426.128	436.599	441.102	455.503	449.680
8	Dompu	226.218	234.665	238.386	241.888	245.387
9	Bima	450.976	463.419	468.682	473.890	478.967
10	Kota Bima	148.645	156.400	159.736	163.503	166.407
	Pulau Sumbawa	1.399.937	1.420.807	1.441.297	1.461.454	1.481.331
	Pulau NTB	4.710.835	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578

Sumber : BPS Provinsi NTB, tahun 2017

Dari data di atas persebaran penduduk di Provinsi NTB tergolong belum merata karena lebih dari 70% penduduk bertempat tinggal di pulau Lombok. Sementara sisanya berada di Pulau Sumbawa. Jumlah penduduk yang mendiami pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak sebanding dengan luas wilayah dan daya tampung lahan di kedua pulau tersebut. Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414.05 km<sup>2</sup> (76,49%) didiami hanya oleh 1.481.331 jiwa penduduk. Sementara pulau Lombok yang luasnya hanya 4.738.80 km<sup>2</sup> (23,51%) didiami oleh 3.474.274 jiwa penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk antara kedua pulau akan berdampak pada munculnya permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat kelebihan beban lingkungan hidup maka pemerintah perlu melakukan program pembangunan yang berkelanjutan dengan senantiasa mengacu pada pelestarian lingkungan hidup.

#### **3.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya dan Ekonomi di Provinsi NTB**

Kondisi sosial budaya di Provinsi NTB dapat digambarkan melalui beberapa aspek antara lain agama dan pendidikan. Yang pertama adalah aspek agama, Provinsi NTB dikenal sebagai daerah agamis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, berikut adalah Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi NTB 2016 :

**Tabel 3.4**  
**Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut**  
**di Provinsi NTB 2016**

No	Kabupaten / Kota	Islam	Kristen	Katalok	Hindu	Budha	Kong-Hu Cu	Jumlah
1	Lombok Barat	94,33	0,19	0,07	5,14	0,27	0,00	100,00
2	Lombok Tengah	99,65	0,03	0,01	0,29	0,01	0,00	100,00
3	Lombok Timur	99,92	0,02	0,01	0,06	0,00	0,00	100,00
4	Sumbawa	96,45	0,42	0,47	2,55	0,06	0,03	100,00
5	Dompu	97,96	0,24	0,17	1,62	0,00	0,00	100,00
6	Bima	99,50	0,14	0,29	0,07	0,00	0,00	100,00
7	Sumbawa Barat	98,44	0,33	0,29	0,01	0,00	0,01	100,00
8	Lombok Utara	92,19	0,02	0,01	4,21	0,00	0,00	100,00
9	Kota Mataram	82,00	1,60	0,86	14,47	1,06	0,01	100,00
10	Kota Bima	98,51	0,81	0,49	0,17	0,03	0,00	100,00
NTB		96,78	0,26	0,19	2,45	0,32	0,00	100,00

Sumber : DPMD, Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan data di atas persentase agama yang dianut paling banyak adalah agama islam, terlebih di Lombok Timur yaitu sebanyak 99,92%, sedangkan agama Hindu merupakan agama yang cukup banyak pula penganutnya terlebih di Kota Mataram yaitu 14,47%. Melihat hal tersebut sangat terlihat bahwa agama islam di provinsi NTB sangat menonjol, dan didukung banyaknya masjid yang tersebar di Provinsi NTB yaitu 5.500 masjid.

Kedua adalah aspek Pendidikan dimana IPM merupakan salah satu indeks komposit yang dikembangkan UNDP untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif. IPM merupakan indeks

komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Indeks pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas KOR). Karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global maka UNDP dalam publikasi tahunan *Human Development Report* (HDP) sejak tahun 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis.

Partisipasi sekolah penduduk di Provinsi NTB dalam pendidikan dasar hingga sekolah menengah diharapkan dapat memberikan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ukuran yang digunakan untuk mengkaji partisipasi sekolah merupakan suatu indikator proses yang menunjukkan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah dapat diukur dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut adalah perkembangan angka buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten/Kota se NTB tahun 2013-2017:



**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**  
**Di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf 15+ (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	18.06	17.98	15.55	18.62	15.04
2	Lombok Tengah	21.06	21.51	21.26	19.06	18.26
3	Lombok Timur	11.66	10.71	14.38	12.53	14.34
4	Sumbawa	6.96	8.38	5.92	7.46	6.95
5	Dompu	9.5	10.73	8.48	8.26	8.42
6	Bima	7.84	9.75	7.62	9.52	10.59
7	Sumbawa Barat	5.96	5.55	6.4	5.46	5.37
8	Lombok Utara	19.95	19.53	18.62	18.96	16.54
9	Kota Mataram	5.62	6.41	6.74	7.26	8,29
10	Kota Bima	3.83	3.58	4.28	4.21	6.78
<b>Provinsi</b>		<b>12.81</b>	<b>13.04</b>	<b>13.03</b>	<b>12.94</b>	<b>12.86</b>

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

Sejak tahun 2014-2017 angka buta huruf mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen. Penurunan angka buta huruf ini sebagai implikasi dari meningkatnya rata-rata lama sekolah. APS, APK dan APM serta menurunnya angka drop out. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerangi buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas adalah memperluas jangkauan program keaksaraan fungsional dasar. Keaksaraan fungsional mandiri, menambah tutor keaksaraan yang terlatih dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk memerangi buta huruf dan menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan moral masyarakat dan melakukan kerjasama /MoU dengan berbagai komponen /elemen masyarakat yang kompeten menangani Pemberantasan Buta Aksara (PBA).

### 3.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan RTRW Provinsi NTB 2009 – 2029 dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alami yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan terjadi kalau ekonomi Nusa Tenggara Barat terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah menetapkan 12 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu, 1) Mataram Metro; 2) Senggigi Tiga Gili; 3) Agropolitan Rasimas; 4) Kute; 5) Agroindustri Pototano; 6) Agropolitan Alas Utan; 7) Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti; 8) Teluk Saleh; 9) Agropolitan Manggalewa; 10) Hu'u; 11) Teluk Bima; 12) Waworade Sape. Dua belas daerah strategis tersebut memiliki berbagai sumber daya baik dari segi pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan.

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, Pesona Gili-

gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pengembangan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. keberhasilan kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Angka Kunjungan Wisatawan Dan Rata-Rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2013-2017**

Indikator	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan Wisatawan	1.357.602	1.629.122	2.210.527	3.094.437	3.508.903
-Mancanegara	565.944	752.306	1.149.235	1.404.328	1.430.429
-Nusantara	791.658	876.816	1.061.292	1.690.109	2.078.654
Rata-rata Lama Menginap (Malam)	3.07	4.37	2.82	2.02	2.64

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program visit Lombok Sumbawa yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan penguatan branding Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3,5 juta wisatawan pada akhir tahun 2017.

### 3.1.6 Perekonomian di Provinsi NTB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi NTB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah, semakin besar PDRB mengindikasikan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di sebuah daerah. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS diketahui bahwa PDRB Provinsi NTB atas dasar harga konstan tahun 2010 selalu meningkat yaitu dari Rp.69.766.714.410.000 di tahun 2013 menjadi Rp.94.644.993.200.000 di tahun 2017, sedangkan PDRB NTB tanpa tambang meningkat dari Rp.60.640.342.610 di tahun 2013 menjadi Rp.77.888.661.240.000 di tahun 2017. Tabel berikut menyajikan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing masing sektor dalam periode tahun 2013 – 2017. Berikut adalah PDRB ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha provinsi NTB Tahun 2013-2017:

**Tabel 3.7**  
**PDRB ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha provinsi NTB**  
**Tahun 2015-2017**

NO	SEKTOR	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18.924.911,25	19.586.874,97	20.879.656,82
2	Pertambangan dan Penggalian	23.267.235,76	24.500.906,51	19.635.136,64
3	Industri pengolahan	3.772.631,62	3.971.233,79	4.206.655,10
4	Pengadaan listrik, gas	67.276,04	74.846,50	78.058,29
5	Pengadaan air	66.026,55	69.258,24	72.453,21
6	Konstruksi	7.774.389,21	8.413.858,02	9.054.621,41
7	Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	10.337.333,54	11.148.450,95	12.111.622,87
8	Transportasi dan pergudangan	5.680.446,86	5.919.301,50	6.344.726,11
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.403.759,40	1.54.445,45	1.663.016,06
10	Informasi dan komunikasi	1.825.487,22	1.985.875,29	2.157.765,38
11	Jasa keuangan	2.480.270,66	2.795.931,48	3.074.943,13
12	Real estate	2.356.412,72	2.501.998,145	2.678.341,08
13	Jasa perusahaan	139.118,53	148.844,69	157.586,61
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.362.398,00	4.492.494,41	4.640.840,97
15	Jasa pendidikan	3.595.360,95	3.812.649,21	4.062.119,86
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.612.979,82	1.704.947,67	1.825.594,94
17	Jasa lainnya	1.754.482,67	1.864.804,96	2.001.854,72
<b>PDRB</b>		<b>89.766.741,41</b>	<b>94.372.963,80</b>	<b>94.644.993,20</b>
<b>PDRB Tanpa Tambang</b>		<b>68.640.342,61</b>	<b>72.448.556,13</b>	<b>77.888.661,24</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai tambah terbesar berasal dari sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan, ditahun 2015 sebesar 18.924.911,25 ditahun 2016 sebesar 19.586.874,97 dan tahun 2017 sebesar 20.879.656,82

sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian yang setiap tahunnya tidak stabil yaitu pada tahun 2015 sebesar 23.267.235,76 namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24.500.906,51 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 19.635.136,64.

### **3.2 Gambaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB**

#### **3.2.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasa disingkat dengan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bappeda Provinsi NTB sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, harus dapat memberikan peranan sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka visi Bappeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu Bappeda telah merumuskan visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu : “MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”. Penjabaran dari Visi Bappeda Provinsi NTB diatas adalah sebagai berikut :1) Lembaga adalah wadah dimana orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan

memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan; 2) Perencana adalah penyusun atau pembuat rencana baik konsep maupun uraiannya; 3) Andal memiliki arti yang dapat dipercaya.

Agar dapat mewujudkan Visi diatas, maka rumusan Misi Bappeda Provinsi NTB harus selaras dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi NTB periode 2013 – 2018. Untuk itu, Bappeda Provinsi NTB menetapkan MISI 2013 – 2018 sebagai berikut :

1) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.; 2) Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan.; 3) Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan; 4) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah; 5) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah; 6) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Bappeda Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan dari misi Bappeda Provinsi NTB antara lain : Misi 1 : Merumuskan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang

berbasis masyarakat, tata ruang, dan teknologi informasi; Misi 2 : Merumuskan arah kebijakan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal; Misi 3 : Menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, holistik, integrative, tematik, dan spasial; Misi 4 : Mewujudkan integrasi dan keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup; Misi 5 : Mengakomodir kepentingan multi-pihak dan multi-level dalam alur perencanaan pembangunan dan menjamin konsistensi dan harmonisasi perencanaan multi-level dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan; Misi 6 : Melaksanakan reformasi birokrasi di internal BAPPEDA Provinsi NTB dalam pemberian pelayanan publik; Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang berwibawa.\

### **3.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda NTB**

Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi NTB Sesuai dengan PERGUB Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TUPOKSI BAPPEDA Provinsi NTB didefinisikan sebagai berikut.

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jangka Panjang,



Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi.
2. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi
3. penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional
4. pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi.
5. Penyusunan rencana anggaran pemerintah provinsi bersama-sama dengan biro keuangan, dengan koordinasi sekda provinsi, disamping mengkoordinasikan penyusunan APBN Provinsi bersama Departemen Keuangan/DJA dan Instansi Sektoral.
6. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
7. penyiapan dan pengembangan, rencana pelaksanaan pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
8. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektoral dan wilayah provinsi, kabupaten/kota
9. pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain sesuai dengan petunjuk Gubernur.

## B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub bagian Program dan Pelaporan
  - b) Sub bagian Keuangan
  - c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
  - a) Sub bidang Pangan dan Pertanian
  - b) Sub bidang Investasi dan Keuangan
  - c) Sub bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata
  - d) Bidang Perencanaan Tata Ruang dan, terdiri dari:
    1. Sub bidang Perencanaan Wilayah
    2. Sub bidang Pekerjaan Umum Permukiman dan Transportasi
    3. Sub bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
  - e) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
    1. Sub bidang Sosial Ketenaga kerjaan dan Kependudukan
    2. Sub bidang Pendidikan dan Kesehatan
    3. Sub bidang Pemerintahan dan Politik
6. Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
  - a). Sub bidang Pengendalian Perencanaan, bertugas untuk menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya

- b). Sub bidang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan bertugas Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan, menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian, menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program; dan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c). Sub bidang Pendataan dan Sistem Informasi bertugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi, melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah, mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah, menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuanpelaksanaantugas unit terkait, menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi, melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah, mengoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyusun laporan hasil pelaksanaan

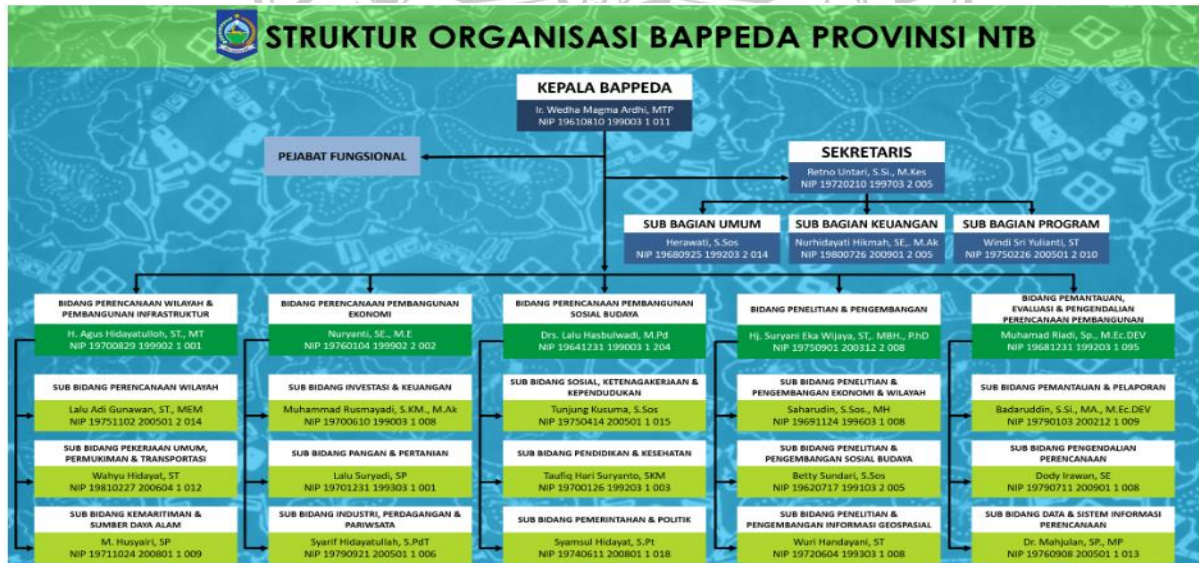
pembangunan daerah secara periodic sebagai bahan evaluasi, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, mengelola data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

7. Bidang Penelitian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah
- b) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
- c) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial

8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB**



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, 2019